

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH, PENGENDALIAN  
AKUNTANSI, KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(STUDI EMPIRIS PADA OPD DI PEKANBARU)**

**Hery Rosalia<sup>1)</sup>, M. Rasuli<sup>2)</sup>, Pipin Kurnia<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Email: [rosaliahery@gmail.com](mailto:rosaliahery@gmail.com)

*The Influence Of Government Apparatus Competency, Accounting Control, Adherence To  
Rule Of Law, And Budgetary Participation On performance accountability of  
government entity  
(Empirical Study On The Opd In Pekanbaru)*

**ABSTRACT**

*This study was aimed to examine the influence of government apparatus competency, accounting control, adherence to rule of law, and budgetary participation on performance accountability of government entity. sample of this study is regional apparatus organization of pekanbaru city. The sampling method is used purposive sampling methode with total 99 respondents and the population 45 regional apparatus organization used in this study. The data source used in the study was the primary data. Analysis of data is carried out using multiple regression analysis with the program of SPSS version 23.0 windows. The result proved that: (1) government apparatus competency had a effect on performance accountability of government entity. (2) accounting control had a effect on performance accountability of government entity. (3) adherence to rule of law had effect on performance accountability of government entity. (4) budgetary participation had a effect on performance accountability of government entity.*

*Keyword: Government Apparatus Competency, Accounting Control, Adherence To Rule Of Law, Budgetary Participation, Performance Accountability Of Government Entity*

**PENDAHULUAN**

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait dengan organisasi publik, akuntabilitas institusi pemerintah yang selanjutnya disebut akuntabilitas publik merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi,

misi, strategi, maupun operasionalnya/pelaksanaannya dalam institusi yang bersangkutan (Ahmed, 2006).

Salah satu yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa atau biasa disebut sebagai *good governance*. Pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan

kinerjanya dengan menyampaikan informasi yang rekapan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan. Selain itu pemerintah juga dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat tercapai jika pelayanan diberikan secara transparan dan berakuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah (pusat atau daerah) yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam konteks perwujudan akuntabilitas, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam pembuatan LAKIP, suatu instansi pemerintah harus dapat

menentukan besarnya kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam suatu jumlah atau persentasi. LAKIP dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan (Sofyani & Akbar, 2013).

Pemerintahan kota Pekanbaru merupakan salah satu bagian dari instansi pemerintahan daerah yang hingga saat ini belum mampu menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat memuaskan. Pemerintah kota Pekanbaru memperoleh predikat CC atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya pada tahun 2018 dengan nilai angka 54,68% yang mana hanya naik 1,18% dari tahun 2017. Angka ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Pekanbaru masih memerlukan banyak perbaikan jika hendak untuk mencapai predikat B pada tahun 2019. (<http://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/04/wako-kesal-nilai-sakip-kota-pekanbaru-hanya-naik-118-persen>).

Dari permasalahan di atas bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat penting pelaksanaannya dalam pencapaian *good governance*. Seluruh organisasi perangkat daerah sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan pemerintah tersebut agar tujuan dan rencana kerja pemerintah bisa tercapai dan terlaksana secara efisiensi dan efektivitas. Untuk mencapai terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu: kompetensi aparatur pemerintah, pengendalian akuntansi, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan partisipasi penyusunan anggaran.

Faktor pertama adalah Kompetensi Aparatur Pemerintah. Menurut Wibowo (2016) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Razi (2017), yang meneliti tentang pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kabupaten Indragiri Hulu menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP. Maka apabila semakin baik kompetensi aparatur pada instansi pemerintah tersebut juga akan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang juga akan menghasilkan LAKIP yang baik.

Faktor yang kedua adalah Pengendalian Akuntansi. Pengendalian akuntansi mencakup sistem perencanaan, pelaporan, dan prosedur pengawasan yang didasarkan pada informasi. Tujuan dari pengendalian akuntansi adalah untuk mengamankan aset, melaksanakan, dan mencatat transaksi keuangan serta memastikan keandalan dari informasi dalam catatan keuangan (Setyawan, 2017).

Suhaesti (2016) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bengkalis. Sedangkan Anjarwati (2012) menyatakan tidak menemukan adanya pengaruh

pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor yang ketiga adalah Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan. Ketaatan pada peraturan perundangan pun menjadi pertimbangan atas keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di Indonesia, peraturan-peraturan perundangan tentang keuangan negara diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang (UU), Keputusan Presiden (Keppres), dan peraturan pelaksanaan lainnya. Hingga saat ini, telah banyak undang-undang serta peraturan pemerintah yang diterbitkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Akuntabilitas tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya transparansi dan aturan hukum yang jelas, sehingga pengembangan akuntabilitas dibutuhkan suatu mekanisme dan peraturan yang jelas (Hafiz, 2017).

Adapun hasil penelitian Hafiz (2017) menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Lumenta (2016) menemukan bahwa variabel ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor yang keempat adalah Partisipasi Penyusunan Anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran meningkatkan identifikasi para karyawan tidak hanya dengan sasaran anggaran tapi juga dengan tujuan organisasi karena komitmen organisasi mencakup penerimaan dan kepercayaan akan nilai dan tujuan organisasi, maka partisipasi anggaran meningkatkan komitmen organisasi. Sehingga apabila para

pemerintah daerah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap komitmen organisasi (Arifin, 2012).

Pradana & Supadmi (2018) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian Risdiana (2018) tidak menemukan adanya pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Purworejo.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Faizal & Yaya (2018) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan menambahkan variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran dari penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2019).

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah kota Pekanbaru dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pengendalian Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan, Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada OPD Di Pekanbaru)”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah Kompetensi Aparatur Pemerintah

mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah? 2. Apakah Pengendalian Akuntansi mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah? 3. Apakah Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah? 4. Apakah Partisipasi Penyusunan Anggaran mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 1. Menguji dan menganalisis Kompetensi Aparatur Pemerintah mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Menguji dan menganalisis Pengendalian Akuntansi mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Menguji dan menganalisis Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Menguji dan menganalisis Partisipasi Penyusunan Anggaran mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Instansi Pemerintah Daerah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil keputusan khususnya pada instansi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.
2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya agar wilayah penelitian lebih meluas dan mendalam pada bidang penelitian ini.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana dalam pembelajaran untuk memperdalam wawasan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014).

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang di kenal dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

### **Kompetensi Aparatur Pemerintah**

Menurut Wibowo (2016) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan

suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

### **Pengendalian Akuntansi**

Pengendalian akuntansi adalah sistem pengendalian yang berbasis akuntansi (Setyawan, 2017). Menurut Hery (2009), tujuan dari pengendalian akuntansi adalah mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan. Pengendalian akuntansi mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

### **Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menerbitkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib (Hafiz, 2017).

### **Partisipasi Penyusunan Anggaran**

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada beberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam

menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Jadi partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat diartikan merupakan keikutsertaan seseorang dalam menyusun dan memutuskan anggaran secara bersama. Sukses atau gagalnya para staf dalam suatu SKPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya (Bangun, 2009).

### **Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Keseluruhan kompetensi individu pada hakikatnya dibentuk oleh keahlian, yaitu hal-hal yang bersifat intelektual dan fisik. Kompetensi individu seperti keterampilan manajemen dalam semua organisasi merupakan faktor yang mutlak harus dimiliki oleh aparatur, baik *top level* maupun *staff level*. Hal ini merupakan syarat majunya sebuah organisasi. Sehingga untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, maka aparatur harus mempunyai kompetensi yang tinggi. Kompetensi aparatur pemerintah memungkinkan untuk tercapainya suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif. Apabila dengan adanya dukungan pengelolaan sumber daya manusia, peralatan/sarana dan prasarana serta biaya atau anggaran serta dukungan tugas-tugas umum lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintah, Maka keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik sehingga terwujud pertanggungjawaban yang memadai atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) dan Mubaraq (2017) menemukan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut Zirman (2010) dan Faizal & Yaya (2018) menyatakan kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **H1: Kompetensi Aparatur Pemerintah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

#### **Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Melalui pengendalian akuntansi, instansi pemerintah dapat mengontrol dan mengevaluasi semua kegiatan dan tanggung jawab yang dilakukan. Pengendalian akuntansi dapat menilai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah. Dengan terlaksananya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka semakin meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut Suhaesti (2016) dan Faizal & Yaya (2018) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut Anjarwati (2012) dan Wahyuni (2014) menyatakan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **H2 : Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

### **Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Penerapan sistem akuntabilitas harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang sesuai dan memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh lembaga, seperti penerapan sistem penghargaan dan hukuman secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, ketaatan pada peraturan perundangan menjadi pertimbangan atas keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya transparansi dan aturan hukum yang jelas, sehingga pengembangan akuntabilitas dibutuhkan suatu mekanisme dan peraturan yang jelas (Mubaraq, 2017).

Menurut Hafiz (2017) dan Razi (2017) menyatakan bahwa ketaatan

pada peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut Putri (2015) dan Lumenta (2016) menyatakan ketaatan pada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **H3 : Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

### **Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan agar anggaran yang dibuat dapat sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Aparat instansi pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran memperoleh kesempatan dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan penganggaran. Hal ini sangat penting karena aparat OPD pemerintah akan merasa lebih produktif dan puas akan pekerjaannya ketika dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran yang dapat mencakup aspirasi mereka. Hal ini dapat memaksimalkan kinerja aparat OPD untuk mewujudkan realisasi anggaran dan keseluruhan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hasil penelitian Arifin (2012) dan Pradana & Supadmi (2018) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian Soeksin (2020) dan Risdiana (2018) tidak menemukan adanya pengaruh

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah.

#### **H4 : Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau. Tepatnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru.

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru yang berjumlah 45 OPD. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan penentuan kriteria-kriteria yang dibuat oleh peneliti (Uma & Bougie, 2017). Dalam hal ini secara *purposive sampling* memilih tiga orang responden yaitu kepala OPD, Kasubbag Keuangan, dan Kepala/staff penyusunan AKIP sehingga besar sampel berjumlah 99 orang (3 x 33 OPD).

#### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu (Uma & Bougie, 2017). Sumber data primer

dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk menghitung variabel-variabel penelitian dan pengumpulan datanya dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada responden yang berisi tentang pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pengendalian Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang telah disusun secara terstruktur, dimana sejumlah pertanyaan tertulis disampaikan kepada responden untuk ditanggapi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh responden yang bersangkutan.

#### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini mempunyai empat hipotesis yang diuji dengan mengaplikasikan program SPSS versi 23. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression*). Adapun model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta_1$  = Koefisien regresi kompetensi aparatur pemerintah

- $\beta_2$  = Koefisien regresi pengendalian akuntansi  
 $\beta_3$  = Koefisien regresi ketaatan pada peraturan perundang-undangan  
 $\beta_4$  = Koefisien regresi partisipasi penyusunan anggaran  
 $X_1$  = Kompetensi Aparatur Pemerintah  
 $X_2$  = Pengendalian Akuntansi  
 $X_3$  = Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan  
 $X_4$  = Partisipasi Penyusunan Anggaran  
 $\varepsilon$  = Standar *error*

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan pengujian statistik, diketahui bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempunyai nilai minimum 30 dan nilai maksimum 40. Nilai mean 34.37 dengan standar deviasi 2.186. Kompetensi aparatur pemerintah ( $X_1$ ) mempunyai nilai minimum 35 dan nilai maksimum 50. Nilai mean 44.49 dengan standar deviasi 3.869. Pengendalian akuntansi ( $X_2$ ) mempunyai nilai minimum 12 dan nilai maksimum 20. Nilai mean 16.10 dengan standar deviasi 2.187. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan ( $X_3$ ) mempunyai nilai minimum 10 dan nilai maksimum 15. Nilai mean 12.13 dengan standar deviasi 1.329. Partisipasi penyusunan anggaran ( $X_4$ ) mempunyai nilai minimum 12 dan nilai maksimum 18. Nilai mean 14.46 dengan standar deviasi 1.464.

### Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu

kuesioner. Untuk mengukur validitas pertanyaan kuesioner adalah *Product Moment* dari Karl Pearson dengan ketentuan : Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  , maka skor butir pertanyaan kuesioner valid, dan berlaku sebaliknya.

Menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah, pengendalian akuntansi, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan partisipasi penyusunan anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi  $r_{hitung} > r_{tabel}$  . Hal ini berarti menyatakan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

### Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas data menunjukka nilai *Cronbach's Alpha* atas kompetensi aparatur pemerintah sebesar 0.952, pengendalian akuntansi sebesar 0.898, ketaatan pada peraturan perundang-undangan sebesar 0.733, partisipasi penyusunan anggaran sebesar 0.840, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0.897. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai *Cronbach's Alpha*  $> 0.60$ . Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat terlihat bahwa nilai *Kolmogrov-Smirnov* untuk semua persamaan regresi signifikan di atas 0.05. Hal ini menyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari kedua hasil uji normalitas baik dari analisis grafik maupun uji statistik dapat disimpulkan bahwa model-model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

#### Hasil Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas keempat variabel yaitu kompetensi aparatur pemerintah (X1), pengendalian akuntansi (X2), ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X3), dan partisipasi penyusunan anggaran (X4) memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF setiap variabel < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas dalam model persamaan regresi linear berganda ini

**Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas**

| Model | Collinearity Statistics |       | Keterangan              |
|-------|-------------------------|-------|-------------------------|
|       | Tolerance               | VIF   |                         |
| X1    | 0.248                   | 4.037 | Bebas Multikolonieritas |
| X2    | 0.370                   | 2.702 | Bebas Multikolonieritas |
| X3    | 0.311                   | 3.219 | Bebas Multikolonieritas |
| X4    | 0.391                   | 2.556 | Bebas Multikolonieritas |

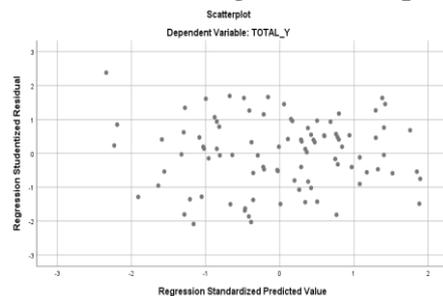
Sumber : Pengolahan data dengan SPSS, 2020

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar grafik *Scatterplot*, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar di atas dan di

bawah angka 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

**Gambar 1 Diagram Scatterplot**



#### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan permasalahan, tujuan, kerangka konsep dan hipotesis dalam penelitian ini, selanjutnya dikembangkan model analisis berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

#### Hasil Pengujian Hipotesis

##### Hasil Uji Hipotesis Kompetensi Aparatur Pemerintah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari data yang diperoleh diatas diketahui bahwa nilai t hitung 7,799 > 1,987 (t tabel) dan nilai Sig 0,000 < 0,05. Artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan adanya kompetensi aparatur yang baik, dan didukung oleh pemahaman sistem akuntansi

keuangan daerah serta kompetensi sumber daya manusia, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Begitu pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Razi (2017) yang menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **Hasil Uji Hipotesis Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Dari data yang diperoleh di atas diketahui bahwa nilai  $t$  hitung  $3,603 > 1,987$  ( $t$  tabel) dan nilai Sig  $0,001 < 0,05$ . Artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima, ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Suhaesti (2016) menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **Hasil Uji Hipotesis Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Dari data yang diperoleh di atas diketahui bahwa nilai  $t$  hitung  $4,417 > 1,987$  ( $t$  tabel) dan nilai Sig  $0,00 < 0,05$ . Artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, ini menunjukkan bahwa variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Apabila aparat yang berada di suatu organisasi taat akan peraturan perundang-undangan maka akan meningkatkan kinerja di dalam suatu organisasi tersebut dan sebaliknya apabila suatu instansi pemerintah tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan maka akan menurunkan kinerja di dalam suatu organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor penentu untuk menghasilkan kinerja yang baik di dalam suatu organisasi.

Penelitian ini mendukung penelitian Mubaraq (2017) menyimpulkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **Hasil Uji Hipotesis Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Dari data yang diperoleh di atas diketahui bahwa nilai  $t$  hitung  $12,220 > 1,987$  ( $t$  tabel) dan nilai Sig

$0,000 < 0,05$ . Artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima, ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi.

Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan agar anggaran yang dibuat dapat sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Aparat instansi pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran memperoleh kesempatan dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan penganggaran. Hal ini sangat penting karena aparat OPD pemerintah daerah akan merasa lebih produktif dan puas akan pekerjaannya ketika dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran yang dapat mencakup aspirasi mereka. Hal ini dapat memaksimalkan kinerja pegawai untuk mewujudkan realisasi anggaran dan keseluruhan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Penelitian ini mendukung penelitian Pradana & Supadmi (2018) menyimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai *R Square* dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai *R Square* berkisar antara 0 sampai dengan 1.

Pada umumnya sampel dalam item tertentu yang disebut data silang (*cros section*) memiliki *R Square* maupun *Adjusted R Square* yang cukup tinggi. Berikut ini tabel hasil uji koefisien determinasi :

**Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .978 <sup>a</sup> | 0.956    | 0.954             | 1.291                      |

**Sumber:** *Pengolahan data dengan SPSS, 2020*

Berdasarkan hasil tabel diatas, menunjukkan nilai *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0, 954. Artinya sumbangan pengaruh variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  terhadap  $Y$  adalah sebesar 95,40% sedangkan sisanya 4,60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi seorang pegawai maka akan semakin tinggi pula kinerja instansi pemerintah yang dihasilkannya.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin

- tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka semakin meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketaatan pada peraturan perundang-undangan pegawai disuatu instansi, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akan dihasilkan.
  4. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat.

#### **SARAN**

1. Bagi ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu tentang kompetensi aparatur pemerintah, pengendalian akuntansi, ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan partisipasi penyusunan anggaran. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dan lokasi yang berbeda agar hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi

- pemerintah, sehingga hasil penelitian semakin baik.
2. Bagi pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang lebih intens dengan memperhatikan kompetensi aparatur pemerintah, pengendalian akuntansi, ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan partisipasi penyusunan anggaran guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya.
  3. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hendaknya meningkatkan pengetahuan pegawainya tentang kompetensi aparatur pemerintah, pengendalian akuntansi, ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan partisipasi penyusunan anggaran, maka diharapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru akan mengalami peningkatan yang semakin baik serta dapat meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan visi dan misi di Kota Pekanbaru.
  4. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan untuk mengetahui dan memahami tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmed, R. (2006). *Teori Akuntansi* (5th ed.). Salemba Empat.
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting*

- Arifin, B. W. (2012). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 13(1), 15–27.
- Bangun, A. (2009). *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Faizal, Y. A., & Yaya, R. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo).
- Hafiz, M. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pad. *JOM Fekon*, 4(1), 528–542.
- Hery. (2009). *Teori Akuntansi*. Kencana.
- Mubaraq, H. (2017). Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Pradana, I. G. A. G., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran pada Akuntabilitas Kinerja: Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, Komitmen dan Organisasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 1939–1965.
- Rahayu, P. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

- Dan Kabupaten Bengkalis). *Skripsi*. Universitas Riau.
- Risdiana, P. (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Studi Empiris pada Dinas dan Badan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo).
- Setyawan, H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *JOM Fekon*, 4(1), 251–264.
- Soeksin, S. D., Friandi, S. Z., & Rifai, D. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tarakan*. 1(1), 40–47.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 184–205.
- Suhaesti, S. R. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *JOM Fekon*, 3(1), 705–719.
- Uma, S., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyuni, Adri Satriawan, R., & Savitri, E. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten rokan hulu). *JOM Fekon*, 32, 1–15.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Raja Grafindo Persada.
- Zirman, Edfan, D., & R Muhammad, R. (2010). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi*, 18, 1–10.
- <http://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/04/wako-kesal-nilai-sakip-kota-pekanbaru-hanya-naik-118-persen>